

BAB II

DINAMIKA MIGRASI DAN KEBIJAKAN IMIGRASI DI AMERIKA SERIKAT

2.1. Amerika Serikat sebagai Negara Imigran: Fondasi Historis

Amerika Serikat memiliki sejarah imigrasi yang panjang dan melekat sejak pembentukan negaranya. Proses pembentukan Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari arus migrasi lintas benua yang berperan dalam pengisian wilayah, pembangunan ekonomi, serta pembentukan struktur sosial dan politik negara (Henry, 2025). Sejak masa awal kemerdekaannya pada tahun 1776, imigrasi diposisikan sebagai salah satu elemen penting dalam proses *state-building*, di mana pertumbuhan populasi dan ketersediaan tenaga kerja menjadi prasyarat bagi keberlangsungan dan ekspansi negara.

Secara historis, arus imigrasi ke Amerika Serikat dapat diklasifikasikan ke dalam empat puncak utama yang berkaitan erat dengan kebutuhan struktural negara pada periode-periode tertentu (Hipsman & Meissner, 2013). Puncak pertama imigrasi ke Amerika Serikat terjadi pada fase awal pembentukan negara, ketika kebutuhan utama pemerintah adalah pertumbuhan populasi untuk menopang proses *state-building* dan konsolidasi wilayah. Imigrasi pada periode ini dipandang sebagai sarana strategis untuk mengisi kekosongan demografis, membangun struktur sosial awal, serta memperkuat kapasitas negara yang baru terbentuk. Dalam

konteks ini, migrasi tidak sekedar dipahami sebagai perpindahan penduduk, melainkan sebagai fondasi bagi keberlangsungan negara secara politik dan ekonomi.

Keberagaman penduduk Amerika Serikat telah terbentuk bahkan sebelum negara tersebut berdiri secara formal. Sejak abad ke-17, kolonialisme yang dilakukan oleh Inggris, Prancis, dan Spanyol membawa berbagai kelompok penduduk Eropa ke wilayah Amerika Utara. Migrasi ini mencakup pemukim Inggris di wilayah koloni Atlantik, koloni Prancis di Kanada dan Lembah Mississippi, serta koloni Spanyol di wilayah Florida dan Barat Daya Amerika Utara. Bersamaan dengan itu, perdagangan budak trans-Atlantik menghadirkan populasi Afrika sebagai bagian integral dari struktur sosial dan ekonomi koloni, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan (Wallenfeldt, 2019).

Kelompok-kelompok tersebut menetap dan berkembang di 13 koloni yang tersebar di wilayah timur benua Amerika Utara. Setelah Amerika Serikat memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1776, populasi kolonial yang telah terbentuk tidak mengalami pemutusan, melainkan menjadi basis demografis negara baru (U.S. Department of State, 2017). Penduduk keturunan Eropa dan Afrika yang sebelumnya hadir sebagai bagian dari struktur kolonial kemudian bertransformasi menjadi komponen utama masyarakat Amerika Serikat. Proses ini menandai bagaimana imigrasi awal berkontribusi langsung terhadap pembentukan fondasi sosial negara yang bersifat multi etnis dan berlapis secara hierarkis.

Selanjutnya, puncak kedua berlangsung seiring dengan ekspansi teritorial Amerika Serikat ke wilayah barat benua. Ekspansi ini dilandaskan oleh doktrin *Manifest Destiny*, yaitu keyakinan bahwa Amerika Serikat memiliki mandat historis dan moral untuk memperluas wilayahnya dari pantai timur hingga pantai barat Amerika Utara. Dalam praktiknya, doktrin ini diterjemahkan ke dalam kebijakan negara yang berorientasi pada perolehan wilayah dan konsolidasi kekuasaan teritorial. Wilayah yang berhasil diperoleh melalui proses ini mencakup Louisiana, Texas, Oregon, Florida, Indiana, Orleans, hingga California (U.S. Department of State, 2017).

Ekspansi teritorial tersebut tidak hanya bertujuan memperluas batas geografis negara, tetapi juga untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat. Penguasaan wilayah baru membuka akses terhadap lahan pertanian, sumber daya alam, serta jalur perdagangan yang strategis (Routley, 2019). Namun, keberhasilan ekspansi ini mensyaratkan adanya populasi yang mampu menetap, mengelola, dan mempertahankan wilayah-wilayah yang diperluas. Dalam konteks inilah imigrasi memainkan peran strategis sebagai instrumen negara untuk mengisi ruang teritorial sekaligus memperkuat kontrol politik dan ekonomi atas wilayah baru.

Kebutuhan terhadap imigran juga berkaitan erat dengan proses penggantian struktur sosial yang telah ada sebelumnya. Ekspansi ke wilayah barat berlangsung beriringan dengan pengusuran dan peminggiran penduduk asli Amerika melalui

berbagai perjanjian dan kebijakan federal, termasuk serangkaian *Indian treaties* dan *Indian Removal Act* pada dekade 1830-an. Pemerintah Amerika Serikat secara sistematis memindahkan suku-suku asli dari wilayah yang dianggap bernilai secara ekonomi dan strategis, untuk kemudian membuka ruang bagi pemukiman penduduk baru, terutama imigran Eropa dan keturunannya (U.S. Department of State, 2017.).

Puncak ketiga imigrasi ke Amerika Serikat terjadi pada era industrialisasi, ketika transformasi ekonomi dari sistem agraris menuju *manufacture-based economy* menciptakan kebutuhan besar akan tenaga kerja dalam jumlah masif. Periode ini berlangsung dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan ditandai oleh percepatan industrialisasi, ekspansi sektor manufaktur, serta pembangunan infrastruktur berskala nasional. Dalam konteks ini, imigrasi berfungsi sebagai mekanisme utama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh populasi domestik semata.

Industrialisasi Amerika Serikat mendorong pembangunan berbagai sektor strategis, termasuk industri baja, batu bara, tekstil, dan manufaktur berat, serta pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalur kereta api, pelabuhan, dan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar domestik dan internasional. Pembangunan jaringan rel kereta api lintas negara bagian, misalnya, membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dan bersifat padat karya, yang sebagian besar diisi oleh tenaga kerja imigran. Studi menunjukkan bahwa imigran berperan signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan sektor industri

yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada periode ini (Hirschman & Mogford, 2009).

Gelombang besar imigrasi pada era industrialisasi membawa sekitar 23 juta imigran untuk menetap di Amerika Serikat. Para imigran tersebut sebagian besar berasal dari Eropa Selatan dan Timur, serta dalam jumlah yang lebih kecil dari Asia, dan terkonsentrasi di kawasan-kawasan perkotaan dan pusat industri. Urbanisasi yang pesat pada periode ini tidak dapat dilepaskan dari peran imigran sebagai tenaga kerja industri, yang sekaligus membentuk pola permukiman, struktur kelas pekerja, dan dinamika sosial di kota-kota industri Amerika Serikat (Hirschman & Mogford, 2009).

Kontribusi imigran dalam industrialisasi juga tercermin dalam perubahan komposisi demografis nasional. Pada tahun 1920, sekitar sepertiga dari total populasi Amerika Serikat terdiri atas komunitas imigran dan keturunannya. Angka ini menunjukkan betapa sentralnya peran imigrasi dalam menopang transformasi ekonomi negara dari sistem agraris menuju ekonomi industri. Lebih jauh, ketergantungan terhadap tenaga kerja imigran menegaskan bahwa industrialisasi Amerika Serikat tidak hanya didorong oleh inovasi teknologi dan modal, tetapi juga oleh mobilisasi tenaga kerja lintas batas dalam skala besar.

Puncak keempat imigrasi ke Amerika Serikat muncul pada periode pasca-Perang Dunia, ketika dinamika politik internasional dan restrukturisasi tatanan global mendorong mobilitas manusia dalam skala besar. Perang Dunia I dan

terutama Perang Dunia II meninggalkan kehancuran ekonomi, ketidakstabilan politik, serta krisis kemanusiaan di berbagai kawasan, khususnya di Eropa dan kemudian Asia. Kondisi tersebut menciptakan arus migrasi yang tidak lagi semata didorong oleh kebutuhan ekonomi individual, melainkan oleh kebutuhan akan keamanan, stabilitas politik, dan perlindungan dari konflik bersenjata (Henry, 2025).

Dalam konteks ini, Amerika Serikat muncul sebagai salah satu tujuan utama migrasi pasca perang. Posisi Amerika Serikat sebagai negara dengan ekonomi yang relatif stabil, kapasitas industri yang kuat, serta peran sentral dalam tatanan internasional pasca perang menjadikannya magnet bagi para pengungsi, displaced persons, dan migran dari negara-negara yang terdampak konflik. Migrasi pada periode ini mencerminkan perubahan karakter imigrasi ke Amerika Serikat, dari sebelumnya didominasi oleh kebutuhan tenaga kerja dan ekspansi ekonomi, menjadi migrasi yang juga dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan kemanusiaan.

Namun demikian, meningkatnya arus migrasi pasca perang juga memperkuat kesadaran negara akan perlunya kerangka hukum yang lebih terstruktur untuk mengatur siapa yang dapat masuk, menetap, dan memperoleh status hukum di Amerika Serikat. Pada titik inilah imigrasi semakin diposisikan sebagai isu kebijakan nasional yang berkaitan dengan keamanan, kepentingan ekonomi, dan identitas negara. Berbagai regulasi imigrasi yang diberlakukan pada

pertengahan abad ke-20 menunjukkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara komitmen kemanusiaan pasca perang dan kepentingan nasional domestik (Henry, 2025).

Perubahan paling signifikan dalam pengelolaan imigrasi Amerika Serikat kemudian dilembagakan melalui *Immigration and Nationality Act* (INA) tahun 1965. Undang-undang ini menjadi bentuk pergeseran fundamental dari sistem kuota berbasis asal kebangsaan yang diskriminatif menuju sistem yang menekankan kualifikasi imigran, terutama melalui prinsip reunifikasi keluarga dan kebutuhan tenaga kerja berbasis keterampilan. INA 1965 tidak hanya mereformasi kriteria penerimaan imigran, tetapi juga membentuk kerangka kebijakan imigrasi yang menjadi dasar bagi pengelolaan migrasi ke Amerika Serikat hingga saat ini..

2.2. Kebijakan Penerimaan Imigran di Amerika Serikat

2.2.1. Lembaga Penerimaan Imigran di Amerika Serikat

Citra Amerika Serikat sebagai negara dengan jumlah imigran terbesar di dunia tidak dapat dilepaskan dari disahkannya *Immigration and Nationality Act* (INA) tahun 1965. Undang-undang ini menjadi titik balik penting dalam sejarah kebijakan imigrasi Amerika Serikat karena secara fundamental mengubah sistem penerimaan imigran yang sebelumnya berbasis kuota asal kebangsaan (American Immigration Council, 2024). Melalui INA 1965, Amerika Serikat mulai menerapkan sistem preferensi

yang menekankan reunifikasi keluarga, penerimaan imigran berbasis keterampilan (*skill-based immigration*), serta pertimbangan perlindungan bagi individu yang menghadapi kondisi tidak aman di negara asalnya. Kerangka kebijakan ini kemudian membuka peluang migrasi yang lebih luas dari berbagai kawasan dunia dan menjadi pondasi utama rezim imigrasi Amerika Serikat hingga saat ini.

Sejak imigrasi diinstitusionalisasikan sebagai kewenangan federal, kebijakan imigrasi Amerika Serikat mengalami evolusi yang berkelanjutan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi negara. Pada fase awal, proses naturalisasi belum diatur secara seragam dan kewenangan tersebut tersebar di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pengadilan federal, negara bagian, hingga tingkat kota. Ketidakteraturan ini mendorong Kongres untuk mengesahkan *Basic Naturalization Act* tahun 1906, yang bertujuan menciptakan standar nasional dalam proses naturalisasi (U.S. Citizenship and Immigration Services, 2025). Upaya penyeragaman ini mencerminkan meningkatnya kesadaran negara akan pentingnya kontrol terpusat terhadap keanggotaan politik dan kewarganegaraan.

Proses institusionalisasi kebijakan imigrasi semakin diperkuat dengan pembentukan *Immigration and Naturalization Service* (INS) pada tahun 1933. INS berperan sebagai lembaga federal yang mengkoordinasikan

pengelolaan imigrasi dan naturalisasi secara menyeluruh, termasuk pengawasan masuknya imigran, pemberian status penduduk tetap, serta proses naturalisasi. Seiring waktu, cakupan kewenangan INS terus berkembang dan mencerminkan kompleksitas kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang semakin meningkat.

Melalui lembaga ini, negara mengembangkan seperangkat kebijakan yang mencakup penyediaan jalur imigrasi selektif, pengaturan masuknya wisatawan, pelaku bisnis, dan pengunjung sementara lainnya, serta pemeriksaan imigran di pelabuhan masuk darat, laut, dan udara. Selain itu, pemerintah federal juga mengelola berbagai manfaat keimigrasian seperti status penduduk tetap dan proses naturalisasi, memberikan perlindungan melalui mekanisme suaka dan penerimaan pengungsi, melakukan patroli perbatasan, serta menegakkan hukum imigrasi melalui penangkapan dan deportasi terhadap individu yang masuk atau tinggal secara tidak sah atau dianggap mengancam keamanan nasional (U.S. Citizenship and Immigration Services, 2025). Perluasan kewenangan ini menunjukkan bahwa imigrasi tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai instrumen strategis negara dalam mengelola kepentingan ekonomi, demografis, dan keamanan nasional secara terintegrasi.

Peristiwa serangan teroris 11 September 2001 menjadi titik krusial yang memperkuat urgensi keamanan dalam kebijakan imigrasi Amerika

Serikat dan secara signifikan mengubah orientasi kerja lembaga imigrasi federal (American Immigration Council, 2021). Pasca-9/11, penegakan hukum imigrasi semakin difokuskan pada pengamanan perbatasan serta identifikasi dan pemindahan individu asing yang dianggap berpotensi mengancam keamanan nasional. Imigrasi tidak lagi dipandang semata sebagai isu administrasi kependudukan, melainkan sebagai bagian integral dari strategi kontra-terorisme negara. Meskipun demikian, Amerika Serikat tetap mempertahankan komitmen normatifnya untuk menerima imigran secara sah serta mendorong proses asimilasi dan partisipasi mereka dalam kehidupan sipil Amerika.

Perubahan orientasi tersebut kemudian dilembagakan secara struktural melalui disahkannya *Homeland Security Act* tahun 2002, yang secara resmi membubarkan *Immigration and Naturalization Service* (INS) pada 1 Maret 2003. Fungsi dan kewenangan INS selanjutnya dialihkan ke tiga lembaga federal baru yang berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (*Department of Homeland Security/DHS*). *U.S. Customs and Border Protection* (CBP) bertanggung jawab atas pencegahan masuknya narkoba, senjata, teroris, serta individu yang tidak memenuhi syarat masuk ke wilayah Amerika Serikat. *Immigration and Customs Enforcement* (ICE) menjalankan penegakan hukum pidana dan perdata yang berkaitan dengan pengawasan perbatasan, bea cukai, perdagangan, dan imigrasi. Sementara itu, *U.S. Citizenship and Immigration Services* (USCIS) berfokus pada

pengelolaan imigrasi legal, termasuk proses naturalisasi dan pemberian status keimigrasian (U.S. Citizenship and Immigration Services, 2025).

Meskipun ketiga lembaga tersebut memiliki mandat yang terpisah, mereka tetap bekerja secara terkoordinasi dan mewarisi kerangka kerja institusional INS. Restrukturisasi ini menegaskan semakin kuatnya keterkaitan antara kebijakan imigrasi dan agenda keamanan nasional Amerika Serikat, sekaligus membuka ruang bagi pengelolaan imigrasi yang semakin terfragmentasi namun berorientasi strategis.

Setelah pengelolaan imigrasi semakin terinstitusionalisasi dan terintegrasi dengan agenda keamanan nasional, kebijakan imigrasi Amerika Serikat kemudian dioperasionalkan melalui seperangkat instrumen hukum dan administratif yang menentukan siapa yang dapat masuk, tinggal, dan menetap secara permanen di wilayah negara tersebut. Dengan kata lain, perubahan kelembagaan pasca-9/11 tidak hanya memperkuat kapasitas negara dalam mengawasi mobilitas manusia, tetapi juga memperjelas mekanisme seleksi yang digunakan untuk mengatur akses terhadap keanggotaan politik dan sosial di Amerika Serikat.

Instrumen utama dalam pengelolaan imigrasi tersebut diwujudkan melalui berbagai status keimigrasian, seperti visa sementara, status penduduk tetap (*lawful permanent resident*), serta mekanisme perlindungan seperti suaka dan pengungsi. Status-status ini tidak hanya menentukan

legalitas keberadaan seorang imigran, tetapi juga membentuk batasan hak, akses ekonomi, dan peluang integrasi sosial. Dalam konteks ini, *green card* menjadi salah satu instrumen paling sentral karena merepresentasikan titik temu antara kepentingan negara, kebutuhan ekonomi, dan aspirasi imigran untuk menetap secara permanen di Amerika Serikat.

2.2.2. Lawful Permanent Resident Visa (Green Card)

Saat memasuki Amerika Serikat, calon imigran perlu memiliki *immigrant visa* yang akan menjadi izin masuk dan valid untuk digunakan selama 6 bulan. Untuk mendaftar *green card*, calon imigran memerlukan *immigrant visa*. *Green card* sendiri secara sederhana dapat disebut sebagai izin tinggal atau *lawful permanent resident*, dimana pemilik *green card* memiliki izin sah untuk tinggal dan bekerja di Amerika Serikat secara permanen. Akan tetapi berbeda dengan kewarganegaraan, pemilik *green card* bukan berarti telah berganti kewarganegaraan sebagai U.S. citizen. Pemilik *green card* tetap dianggap sebagai imigran yang sudah memiliki izin tinggal permanen di Amerika Serikat. Untuk mendapatkan *green card*, terdapat prosedur yang telah ditetapkan oleh *U.S. Citizenship and Immigration Services* (USCIS) selaku lembaga imigrasi di Amerika Serikat.

Pemberian *green card* di Amerika Serikat tidak dilakukan secara universal, melainkan melalui sistem kategorisasi yang merefleksikan

prioritas dan kepentingan negara. Pemerintah federal menetapkan sejumlah kategori kelayakan (*eligibility categories*) yang berfungsi sebagai mekanisme seleksi terhadap individu yang dianggap memiliki hubungan keluarga, kontribusi ekonomi, atau kebutuhan perlindungan tertentu. Dengan demikian, kategori *green card* tidak hanya berfungsi sebagai klasifikasi administratif, tetapi juga sebagai cerminan nilai dan kepentingan yang ingin diprioritaskan negara dalam menerima imigran secara permanen.

Tabel 2.1. Kategori yang eligible untuk mendapatkan Green Card menurut USCIS

Source: (U.S. Citizenship and Immigration Service)

Kategori Green Card	Keterangan
<i>Green Card through Family</i> (Jalur Keluarga)	<ul style="list-style-type: none"> ● Keluarga langsung atau tidak langsung dari warga negara Amerika Serikat ● Tunangan dan anak dari warga negara Amerika Serikat ● Mantan suami/istri dari warga negara Amerika Serikat ● Termasuk dalam kategori <i>VAWA self petitioner</i>
<i>Green Card through Employment</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pekerja profesional dengan kualifikasi tinggi yang termasuk dalam kategori EB-1, EB-2, EB-3, dan EB-4 ● Dokter yang bersedia mengabdikan area dan waktu yang ditentukan oleh negara

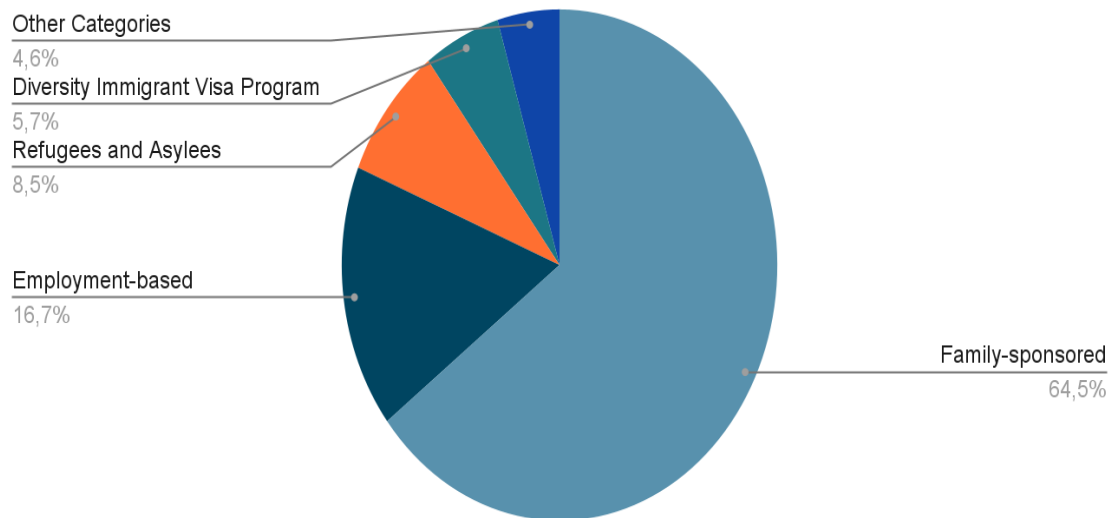
	<ul style="list-style-type: none"> • Investor yang menanamkan modal minimal USD 1.050.000, atau USD 800.000 di wilayah sasaran tertentu, dalam usaha komersial baru di Amerika Serikat yang menciptakan setidaknya 10 lapangan pekerjaan penuh waktu (EB-5).
<p><i>Green Card as a Special Immigrant</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota denominasi keagamaan yang datang ke Amerika Serikat untuk bekerja pada organisasi keagamaan nirlaba dalam kapasitas keagamaan tertentu. • Anak di bawah umur yang membutuhkan perlindungan pengadilan anak karena mengalami kekerasan, penelantaran, atau pengabaian oleh orang tua. • Warga negara Afganistan atau Irak yang pernah bekerja sebagai penerjemah atau juru bahasa untuk pemerintah Amerika Serikat; warga Irak yang bekerja untuk atau atas nama pemerintah AS di Irak sejak 20 Maret 2003 selama minimal satu tahun; atau warga Afghanistan yang bekerja untuk pemerintah AS atau <i>International Security Assistance Force</i> (ISAF). • Individu yang datang untuk bekerja di Amerika Serikat sebagai bagian dari media di bawah <i>U.S. Agency for Global</i>

	<p><i>Media</i> (USAGM) atau penerima hibah USAGM.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mantan pejabat atau pegawai organisasi internasional atau NATO yang memenuhi syarat, serta anggota keluarga yang memenuhi kriteria sebagai tanggungan.
<p><i>Green Card through Refugee or Asylee Status</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Refugee (pengungsi) yang statusnya telah ditetapkan setidaknya dalam 1 tahun terakhir ● Asylee (pencari suaka) yang statusnya telah ditetapkan setidaknya dalam 1 tahun terakhir
<p><i>Green Card for Human Trafficking and Crime Victims</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Individu yang memiliki <i>T nonimmigrant status</i> (terlibat dalam human trafficking) ● Individu yang memiliki <i>U nonimmigrant status</i> (sebagai crime victim)
<p><i>Green Card for Victims of Abuse</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Termasuk dalam kategori <i>VAWA self petitioner</i> ● Pasangan atau anak dari warga negara CUBA yang mengalami kekerasan (di bawah <i>Cuban Adjustment Act</i>)

Berdasarkan pembagian kategori *green card* tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan imigrasi Amerika Serikat dibangun di atas tiga prinsip

utama yang secara konsisten muncul dalam desain penerimaan imigran permanen. Pertama, prinsip *family reunification* tercermin dari dominannya jalur berbasis keluarga yang menempatkan hubungan kekerabatan sebagai dasar legitimasi utama bagi pemberian status penduduk tetap. Kedua, prinsip *employment-based immigration* menunjukkan bahwa negara secara eksplisit memandang imigrasi sebagai instrumen ekonomi, di mana keterampilan, profesionalisme, dan kapasitas penciptaan nilai ekonomi menjadi faktor penentu kelayakan. Ketiga, prinsip perlindungan kemanusiaan hadir melalui jalur *refugee*, *asylee*, serta kategori khusus lainnya yang diberikan kepada individu dalam kondisi rentan atau luar biasa. Selain itu Amerika Serikat juga mengadakan *Diversity Program* yang merupakan undian bagi sejumlah negara-negara yang ditinjau melalui banyaknya imigran asal negara tersebut yang masuk.

Jumlah penerbitan *green card* di Amerika Serikat menunjukkan dinamika yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun fiskal 2023, tercatat sebanyak 1,17 juta *green card* diterbitkan dalam kurun waktu satu tahun. Sementara itu, hingga sekitar sepertiga perjalanan tahun 2024, pemerintah Amerika Serikat telah menerbitkan sekitar 980.100 *green card*. Angka ini menunjukkan tingginya volume penerimaan penduduk tetap yang berlangsung secara berkelanjutan dalam sistem imigrasi Amerika Serikat.



Gambar 2.1. Kategori *green card* yang diterbitkan oleh AS pada tahun 2023

Source: (Diolah penulis dari USAFacts)

Berdasarkan kategori penerima, mayoritas *green card* yang diterbitkan pada tahun fiskal 2023 berasal dari jalur family-sponsored, yang mencakup 64,6 persen dari total penerbitan. Kategori ini diperuntukkan bagi anggota keluarga dekat warga negara Amerika Serikat, seperti pasangan, anak belum menikah di bawah usia 21 tahun, orang tua, serta anggota keluarga lainnya yang memenuhi ketentuan reunifikasi keluarga. Dominasi kategori ini menunjukkan bahwa reunifikasi keluarga tetap menjadi jalur utama dalam sistem penerimaan penduduk tetap di Amerika Serikat.

Kategori employment-based menempati posisi berikutnya dengan proporsi sebesar 16,7 persen. Jalur ini mencakup individu dengan tawaran pekerjaan di Amerika Serikat, pemilik kemampuan luar biasa, pemegang gelar pendidikan lanjut, serta investor yang memenuhi persyaratan modal tertentu. Selain itu, *green card* juga diberikan kepada *refugees* and *asylees*, yang mencakup 8,5 persen dari total penerbitan, yakni individu yang memperoleh status pengungsi atau suaka karena menghadapi persekusi atau ancaman serius di negara asalnya.

Kategori lain yang turut berkontribusi adalah *Diversity Immigrant Visa Program*, yang menyumbang sekitar 5,7 persen dari total penerbitan *green card*. Program ini memberikan kesempatan imigrasi melalui sistem undian tahunan bagi warga negara dari negara-negara dengan tingkat migrasi historis yang relatif rendah ke Amerika Serikat. Sementara itu, kategori lainnya—yang mencakup imigran khusus seperti pekerja keagamaan, pegawai organisasi internasional tertentu, serta individu yang telah tinggal secara berkelanjutan di Amerika Serikat sejak sebelum 1 Januari 1972—mencakup sekitar 4,6 persen dari total penerbitan.

2.2.3. H1-B Non-immigrant Work Visa

H-1B visa merupakan salah satu kebijakan imigrasi berbasis pekerjaan (*employment-based immigration*) di Amerika Serikat. Visa ini memungkinkan pemberi kerja di Amerika Serikat untuk mempekerjakan

tenaga kerja asing pada posisi yang diklasifikasikan sebagai *specialty occupations*, yaitu pekerjaan yang mensyaratkan pengetahuan khusus serta kualifikasi pendidikan minimal setara dengan gelar sarjana atau yang setara di bidang tertentu. Program H-1B berada di bawah kerangka hukum federal dan diawasi oleh beberapa lembaga pemerintah, termasuk Department of Labor (DOL), Department of Homeland Security (DHS), dan U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) (U.S. Department of Labor, 2026).

Dalam implementasinya, H-1B visa dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor-sektor tertentu, seperti teknologi informasi, teknik, kesehatan, pendidikan tinggi, dan jasa profesional lainnya. Pemberi kerja yang ingin mempekerjakan pekerja asing melalui skema H-1B diwajibkan untuk mengajukan *Labor Condition Application* (LCA) kepada Department of Labor. Melalui LCA, pemberi kerja harus menyatakan bahwa pekerja H-1B akan dibayar sesuai dengan *prevailing wage* yang berlaku dan bahwa perekrutan tenaga kerja asing tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap kondisi kerja dan upah pekerja domestik.

Secara kuantitatif, program H-1B memiliki batas tahunan (*annual cap*) yang ditetapkan oleh pemerintah federal. Setiap tahun fiskal, kuota umum H-1B dibatasi sebesar 65.000 visa, dengan tambahan 20.000 visa yang dialokasikan khusus bagi individu yang memiliki gelar magister atau

lebih tinggi dari institusi pendidikan di Amerika Serikat. Pembatasan kuota ini menjadikan H-1B sebagai skema imigrasi yang bersifat selektif dan kompetitif, terutama di tengah tingginya permintaan dari sektor-sektor berbasis keterampilan tinggi.

Selain sebagai izin kerja sementara, H-1B visa juga memiliki keterkaitan dengan jalur imigrasi permanen. Pemegang H-1B dapat mengajukan penyesuaian status menuju penduduk tetap (*lawful permanent resident*) melalui kategori *employment-based green card*, apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian, H-1B sering dipahami tidak hanya sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan tenaga kerja jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem imigrasi tenaga kerja terampil di Amerika Serikat.

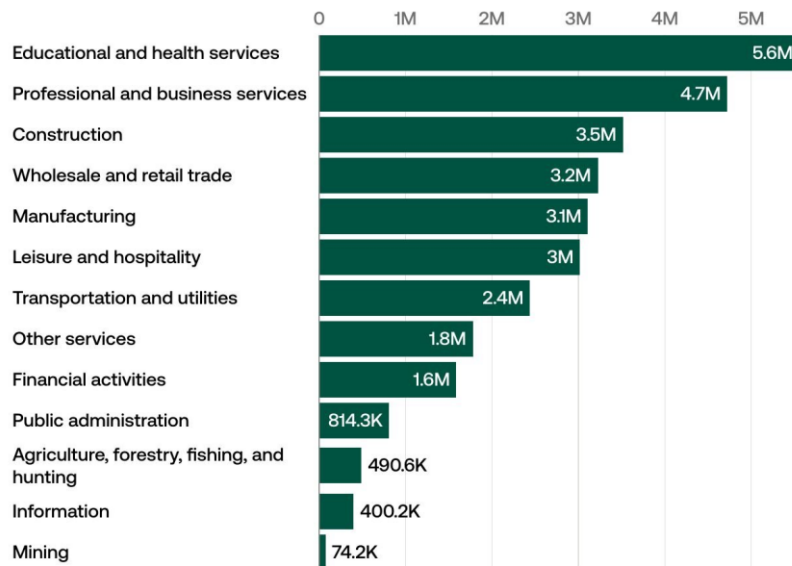
2.3. Imigrasi, Profesi, dan Nilai Ekonomi Imigran di Amerika Serikat

2.3.1. Distribusi Sektor Profesi Imigran di Amerika Serikat

Pada tahun 2024, dari keseluruhan tenaga kerja di Amerika Serikat, sebanyak 20 persen adalah foreign-born. Jumlah ini kian meningkat setiap tahunnya dan penyebaran industrinya semakin meluas.

Educational and health services employ the largest number of foreign-born workers.

Employed foreign-born workers, by industry, 2024



Excludes military workers.
Source: Census Bureau

 USA Facts

Gambar 2.2. Persebaran Sektor Pekerjaan Foreign-born di Amerika Serikat

Source: (USAFacts, 2025)

Berdasarkan grafik di atas, pekerja kelahiran luar negeri di Amerika Serikat tersebar di berbagai sektor ekonomi. Sektor yang menyerap jumlah pekerja imigran terbesar adalah educational and health services dengan sekitar 5,6 juta pekerja, diikuti oleh professional and business services sebanyak 4,7 juta orang. Sektor konstruksi juga mempekerjakan sekitar 3,5 juta pekerja imigran, sementara sektor perdagangan grosir dan ritel serta

manufaktur masing-masing mencatat sekitar 3,2 juta dan 3,1 juta pekerja kelahiran luar negeri.

Selain itu, sektor leisure and hospitality mempekerjakan sekitar 3 juta pekerja imigran, disusul oleh sektor transportation and utilities dengan 2,4 juta orang. Di sisi lain, jumlah pekerja imigran relatif lebih rendah pada sektor financial activities, public administration, agriculture, information, dan mining, yang masing-masing mencatat jumlah di bawah dua juta pekerja. Data ini menggambarkan distribusi sektoral pekerja imigran di Amerika Serikat pada tahun 2024.

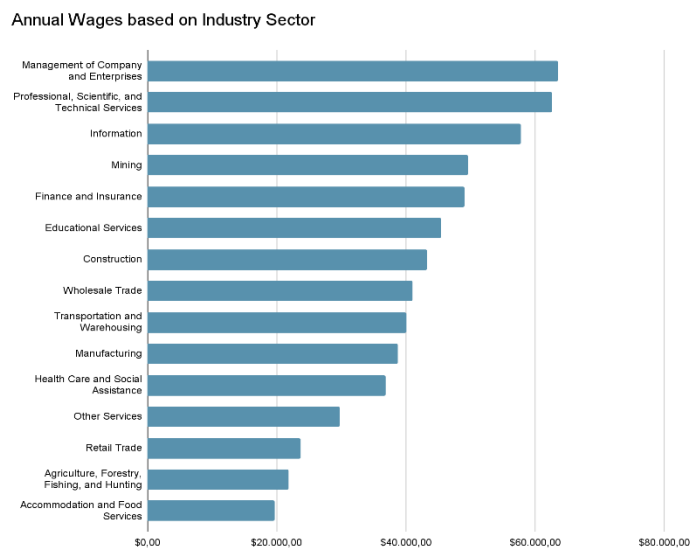
2.3.2. Pendapatan dan Pendidikan Imigran (Nilai Pasar dan Tenaga Kerja)

Setelah memetakan distribusi sektor pekerjaan imigran di Amerika Serikat, penting untuk melihat karakteristik pekerjaan tersebut berdasarkan tingkat keterampilan dan pendapatan. Dalam konteks pasar tenaga kerja, pekerjaan dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berupah dan berketerampilan rendah serta berupah dan berketerampilan tinggi.

Data menunjukkan bahwa pekerja imigran tersebar pada berbagai jenis pekerjaan dalam spektrum tersebut, mulai dari sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan tinggi hingga sektor yang bersifat padat tenaga kerja dengan tingkat upah yang relatif lebih rendah. Untuk memberikan

gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi ekonomi imigran dalam pasar tenaga kerja Amerika Serikat, subbab ini akan memaparkan indikator tingkat pendidikan dan pendapatan imigran. Indikator-indikator ini digunakan untuk menggambarkan profil sosioekonomi imigran secara deskriptif.

Berdasarkan data upah tahunan rata-rata per sektor, sektor pekerjaan di Amerika Serikat dapat dikelompokkan ke dalam kategori berupah relatif tinggi dan berupah relatif rendah. Pengelompokan ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variasi tingkat pendapatan antar sektor yang banyak menyerap tenaga kerja, termasuk pekerja imigran.



Gambar 2.3. Upah tahunan pekerja berdasarkan sektor industri

Source: (Diolah penulis dari berbagai sumber)

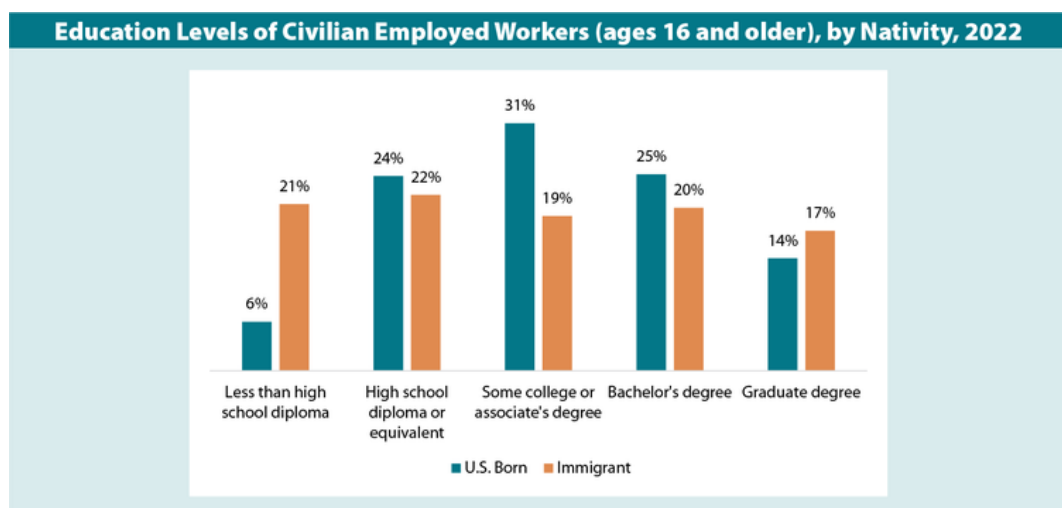
Sektor-sektor dengan tingkat upah tahunan relatif tinggi umumnya berada pada bidang yang berkaitan dengan fungsi manajerial, teknis, dan profesional. Sektor seperti *management of companies and enterprises* serta *professional, scientific, and technical services* mencatat rata-rata upah tahunan di atas USD 60.000. Sektor *information* serta *finance and insurance* juga termasuk dalam kelompok ini dengan tingkat upah mendekati USD 50.000 per tahun. Selain itu, sektor *educational services* menunjukkan tingkat upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor jasa lainnya, dengan rata-rata lebih dari USD 45.000 per tahun. Data ini menggambarkan bahwa sektor-sektor tersebut berada pada kelompok dengan kompensasi ekonomi yang lebih besar dalam struktur pasar tenaga kerja.

Sementara itu, sektor-sektor dengan tingkat upah tahunan menengah hingga rendah mencakup bidang-bidang yang bersifat padat tenaga kerja dan berorientasi pada produksi serta layanan langsung. Sektor *construction, manufacturing, transportation and warehousing*, serta *health care and social assistance* memiliki rata-rata upah tahunan yang berkisar antara USD 35.000 hingga USD 45.000. Di bawah kelompok ini, sektor-sektor seperti *retail trade, other services, agriculture, forestry, fishing, and hunting*, serta *accommodation and food services* mencatat tingkat upah tahunan yang relatif lebih rendah, dengan rata-rata di bawah USD 30.000 per tahun. Sektor-sektor ini umumnya menyediakan pekerjaan dengan karakteristik

layanan langsung atau pekerjaan fisik yang tersebar luas di berbagai wilayah.

Pengelompokan sektor berdasarkan tingkat upah ini memberikan gambaran mengenai variasi pendapatan antar sektor ekonomi di Amerika Serikat. Penyajian data ini berfungsi sebagai konteks awal untuk memahami posisi ekonomi pekerja, termasuk imigran, dalam struktur pasar tenaga kerja, sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai karakteristik pendidikan dan keterampilan tenaga kerja pada bagian selanjutnya.

Selain upah, faktor pendidikan juga menjadi indikator yang penting untuk menentukan pekerjaan dengan keterampilan rendah dan pekerjaan dengan keterampilan tinggi. Berikut disajikan data terkait tingkat edukasi pekerja di Amerika Serikat yang dibag.



Gambar 2.4. Persentase tingkat pendidikan imigran pekerja aktif di Amerika Serikat tahun 2022

Source: (Gelatt, 2024 dari Migration Policy Institute)

Tingkat pendidikan pekerja imigran di Amerika Serikat menunjukkan pola distribusi yang kompleks dan tersebar di berbagai jenjang pendidikan formal. Data milik *Migration Policy Institute* memperlihatkan bahwa pekerja imigran memiliki proporsi yang lebih besar pada kelompok pendidikan rendah, khususnya pada kategori kurang dari sekolah menengah atas, dibandingkan dengan pekerja kelahiran Amerika Serikat. Pada saat yang sama, pekerja imigran juga menunjukkan representasi yang signifikan pada tingkat pendidikan tinggi, termasuk pada jenjang pascasarjana.

Pada tingkat pendidikan menengah, seperti *high school diploma* atau setara, proporsi pekerja imigran dan pekerja kelahiran Amerika Serikat relatif seimbang. Sementara itu, pada kategori *some college* atau *associate's degree* serta *bachelor's degree*, pekerja kelahiran Amerika Serikat memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan pekerja imigran. Perbedaan ini menggambarkan variasi latar belakang pendidikan antara kedua kelompok tenaga kerja tersebut.

Selain itu, pada jenjang pendidikan pascasarjana, pekerja imigran justru mencatat proporsi yang lebih tinggi dibandingkan pekerja kelahiran Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja imigran tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok dengan tingkat pendidikan rendah,

tetapi juga mencakup individu dengan tingkat pendidikan tinggi dan spesialisasi akademik lanjut.

2.3.3. Kontribusi Imigran terhadap Ekonomi Agregat Amerika Serikat

Imigran merupakan bagian integral dalam struktur ekonomi Amerika Serikat dan terlibat dalam berbagai aspek ekonomi agregat, termasuk pasar tenaga kerja, permintaan dan penawaran barang dan jasa, konsumsi, serta penerimaan fiskal negara. Keberadaan imigran tidak hanya berkontribusi melalui partisipasi langsung dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga melalui keterlibatan dalam sistem perpajakan di tingkat lokal, negara bagian, dan federal.

Pada tahun 2023, jumlah populasi imigran di Amerika Serikat tercatat hampir mencapai 48 juta jiwa. Kelompok ini berkontribusi secara signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional, termasuk melalui pembayaran pajak dan partisipasi dalam berbagai sektor produktif. Estimasi menunjukkan bahwa imigran menyumbang sekitar USD 1,7 triliun dalam kegiatan ekonomi dan kontribusi fiskal, mencerminkan peran mereka dalam mendukung basis pendapatan negara (Roy, 2025). Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja imigran juga relatif tinggi, dengan sekitar 66,5 persen imigran berada dalam angkatan kerja aktif, dibandingkan dengan 61,7 persen pada kelompok penduduk kelahiran Amerika Serikat (*U.S.-born*).

Peningkatan jumlah imigran berkaitan dengan bertambahnya pasokan tenaga kerja yang tersedia di pasar, yang selanjutnya berinteraksi dengan tingkat permintaan dan aktivitas ekonomi di berbagai sektor industri. Imigran terdistribusi di berbagai sektor ekonomi, mulai dari sektor jasa, manufaktur, hingga sektor profesional dan teknis. Dalam konteks ini, imigrasi dipahami sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat secara agregat.

Table 2: Effect on real GDP growth in 2025 and 2026 from reduction in immigrants' labor supply and consumer spending, in percentage points

	2025		2026	
	Low	High	Low	High
Direct effect on GDP growth	-0.18	-0.17	-0.08	-0.05
Additional effect owing to reduction in consumer spending	-0.02	-0.02	-0.16	-0.07
Additional effect owing to higher saving among immigrants in U.S.	-0.06	0.00	-0.08	0.00
Total effect on GDP growth	-0.26	-0.19	-0.32	-0.12

BROOKINGS

Gambar 2.5. Dampak reduksi alur imigrasi pada PDB AS

Source: (Edelberg et al., The Brookings)

Berdasarkan tabel di atas, perubahan yang signifikan dalam arus imigrasi memiliki keterkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, khususnya PDB. Pada tahun 2025, penurunan imigrasi bersih menjadi sekitar -0,3, dibandingkan dengan angka positif sekitar 2,0 pada tahun 2025, berkaitan dengan perlambatan pertumbuhan PDB sekitar 0,18 poin

persentase dari tahun sebelumnya (Edelberg et al., 2026). Kemudian terus menurun pada bulan pertama 2026 sebesar -0.08 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya labor supply yang diciptakan imigran dan angka belanja konsumen di Amerika Serikat. Fluktuasi arus imigrasi ini kemudian memiliki implikasi langsung terhadap kapasitas ekonomi nasional, khususnya melalui perubahan dalam jumlah tenaga kerja dan aktivitas ekonomi agregat.

Secara keseluruhan, kontribusi imigran terhadap ekonomi agregat Amerika Serikat dapat dipahami melalui keterlibatan mereka dalam pasar tenaga kerja, konsumsi, dan sistem fiskal. Penyajian data ini memberikan gambaran mengenai posisi imigran dalam struktur ekonomi nasional, serta menjadi konteks penting untuk memahami mengapa imigrasi kerap diposisikan sebagai variabel strategis dalam perumusan kebijakan ekonomi dan imigrasi di tingkat federal.

2.3.4. Remittance dan Batas Kontribusi Ekonomi Domestik

Memiliki izin tinggal dan pekerjaan yang baik di Amerika Serikat tidak menghalangi imigran untuk mengirim uang yang mereka dapatkan ke negara asal mereka untuk membiayai hidup keluarga ataupun orang terdekat. Hal ini disebut juga dengan remittance yang dilakukan untuk meningkatkan arus keuangan dunia. Menurut *World Migration Report 2024*, Amerika Serikat telah menjadi negara sumber *remittance* terbanyak

dan konsisten sejak tahun 2000 hingga tahun 2022 (IOM, 2024). Posisi ini menjadi masuk akal dengan Amerika Serikat yang juga menjadi negara dengan populasi imigran terbanyak di dunia yaitu sebanyak 15,3 persen dari keseluruhan penduduk. Pada 2022, imigran yang tinggal di Amerika Serikat mengirimkan uang total sebanyak hampir USD 80 miliar ke negara asalnya. Jumlah remittance yang keluar dari Amerika Serikat setiap tahunnya sangat dipengaruhi oleh angka imigrasi bersih pada tahun tersebut.

Selain kontribusi melalui *remittance*, imigran yang tinggal di Amerika Serikat juga menjalankan kewajiban fiskal kepada negara melalui pembayaran pajak serta kontribusi terhadap sistem sosial dan kesehatan. Kewajiban ini berlaku bagi imigran dengan berbagai status hukum, termasuk imigran dengan izin tinggal resmi maupun imigran tidak terdokumentasi. Seperti penduduk lainnya, imigran diwajibkan membayar berbagai jenis pajak, antara lain pajak penghasilan, pajak gaji (*payroll taxes*), pajak properti, serta pajak penjualan atas barang dan jasa. Imigran yang bekerja secara formal umumnya memiliki pajak penghasilan dan pajak jaminan sosial yang dipotong langsung dari upah mereka, serta wajib melaporkan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan Internal Revenue Service (IRS). Selain itu, imigran yang memiliki tempat tinggal atau melakukan konsumsi di tingkat negara bagian dan lokal turut berkontribusi melalui pajak properti dan pajak penjualan (American Immigration Council, 2023).

Pengecualian kewajiban pajak hanya berlaku secara terbatas bagi kelompok imigran tertentu. Untuk keperluan perpajakan, individu yang diklasifikasikan sebagai *nonresident aliens* oleh IRS—termasuk mahasiswa internasional dengan visa F-1, J-1, atau M-1 yang telah berada di Amerika Serikat kurang dari lima tahun kalender—dibebaskan dari kewajiban membayar pajak Jaminan Sosial dan Medicare atas upah mereka. Namun demikian, kelompok ini tetap diwajibkan membayar pajak federal, negara bagian, dan lokal lainnya sesuai tarif yang berlaku, serta memiliki akses yang terbatas terhadap manfaat pajak tertentu. Sebagai contoh, *nonresident aliens* tidak berhak mengklaim *Earned Income Tax Credit* (EITC) maupun *Lifetime Learning Credit*, yang umumnya ditujukan bagi rumah tangga berpendapatan rendah hingga menengah (Internal Revenue Service, 2022).

Pengukuran kontribusi pajak imigran secara keseluruhan menghadapi keterbatasan metodologis, mengingat IRS tidak mewajibkan pelaporan kewarganegaraan atau status hukum dalam proses pengajuan pajak. Meski demikian, analisis berbasis data Biro Sensus Amerika Serikat menunjukkan bahwa rumah tangga yang dipimpin oleh imigran menyumbang pembayaran pajak federal, negara bagian, dan lokal sebesar sekitar USD 492 miliar pada tahun 2019, menandakan peran signifikan imigran dalam pembiayaan fiskal negara (American Immigration Council, 2021).

Dalam perdebatan mengenai dampak fiskal imigrasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sejumlah kajian menunjukkan bahwa imigran secara agregat memberikan kontribusi fiskal positif. Analisis oleh *Cato Institute* pada tahun 2023 menemukan bahwa imigran secara keseluruhan memiliki dampak fiskal yang lebih positif dibandingkan penduduk kelahiran Amerika Serikat, dengan mempertimbangkan pendapatan, pajak yang dibayarkan, serta manfaat publik yang diterima. Temuan ini didasarkan pada fakta bahwa, secara rata-rata, imigran membayar lebih banyak pajak dibandingkan manfaat pemerintah yang mereka terima di tingkat federal, negara bagian, dan lokal secara kumulatif (Nowrasteh, 2023).

2.4. Kebijakan Imigrasi di Era Pemerintahan Trump 2.0

Donald Trump dikenal sebagai presiden Amerika Serikat yang memiliki persepsi kuat terhadap imigran. Dimulai sejak kepemimpinannya yang pertama pada tahun 2016-2021, hasil nyata dari kebijakan imigrasi yang dibawa oleh Trump adalah menurunnya arus migrasi masuk ke Amerika Serikat. Dalam satu tahun kepemimpinannya yang kedua, hal yang sama juga mulai terlihat dengan meningkatnya arus migrasi keluar dan menurunnya arus imigrasi yang masuk. Hal ini menjadi dampak dari kebijakan imigrasi Trump yang limitatif terhadap imigran yang masuk dan upaya penangkapan *unauthorized immigrant* yang berada di Amerika Serikat.

Secara garis besar, kebijakan Trump di kedua periode sifatnya sama, membawa prinsip *'America First'* yang tercerminkan dalam kebijakan-kebijakan yang diterapkannya. Kebijakan-kebijakan Trump yang diterapkan pada periode pertamanya berkisar dalam pembatasan imigran masuk seperti adanya Travel Ban, U.S.-Mexico Border Wall Construction, kemudian yang dikenal sebagai Zero-Tolerance Policy, dan penghentian program *Deferred Actions for Childhood Arrivals* (DACA) yang diadakan oleh Obama.

Sama halnya dengan kepemimpinan yang lalu, pada kepemimpinan 2.0 ini Trump masih meregulasikan kebijakan imigrasi yang berdasarkan prinsip yang sama yaitu *America First*. Untuk menekan imigrasi ilegal Trump 2.0 memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti Travel Ban— yang ditargetkan pada 19 negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika—dengan dalih keamanan, penghentian pemberian suaka pada warga negara ketiga, Birthright Citizenship Restriction, dan kontrol ketat di perbatasan selatan. Akan tetapi, terdapat kebijakan-kebijakan baru yang cukup membedakan dari kepemimpinan sebelumnya. Hal ini dituliskan dalam executive orders yang menyatakan:

“It is a priority of my Administration to realign Federal immigration policy with the Nation’s interests by ending illegal immigration and prioritizing the admission of aliens who will affirmatively benefit the Nation, including successful entrepreneurs, investors, and businessmen and women” (The White House, 2025)

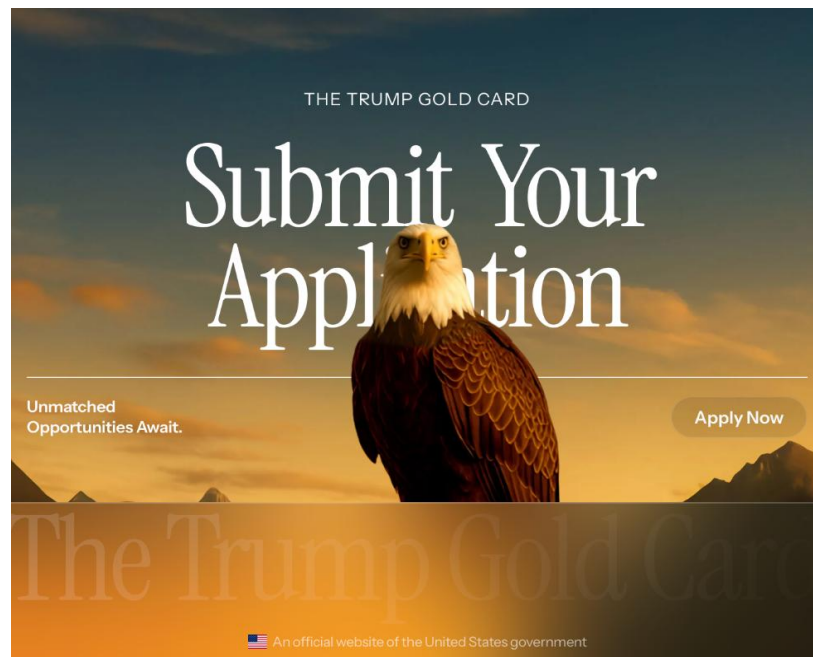
Melalui executive order tersebut, Trump menyatakan intensi untuk memprioritaskan entrepreneur, investor, dan pelaku bisnis yang akan

menguntungkan Amerika Serikat. Seiring dengan ini, Trump membuat kebijakan imigrasi yang memiliki orientasi ekonomi seperti *The Trump Gold Card* dan pengetatan seleksi dan kenaikan biaya visa H-1B.

2.4.1. The Trump Gold Card

Setelah menjadi wacana yang disampaikan oleh Trump pada awal masa jabatannya, kebijakan *The Trump Gold Card* resmi diberlakukan pada Desember 2025. Kebijakan *Gold Card* telah menjadi rencana yang diumumkan oleh administrasi Trump sejak Februari 2025, sebagai kebijakan yang akan menjadi jalur bagi individu berkapital tinggi untuk menjadi warga negara Amerika Serikat. Program ini memiliki sistematika yang identik dengan *EB-5 Investor Green Card Program* yang juga menawarkan individu untuk mendapatkan izin tinggal dengan berinvestasi pada negara. Akan tetapi, *Trump Gold Card* dikemas dengan lebih eksklusif dan mematok jumlah investasi sejumlah 1 juta dollar AS pada setiap individu yang mendaftar.

Setelah *executive order* yang ditandatangani oleh Trump pada September 2025, The Trump Gold Card diresmikan sebagai kebijakan baru pada 10 Desember 2025. Kebijakan ini memiliki skema yang kurang lebih sama dengan *green card*, dimana pemohon akan mendapatkan *a pathway* atau jalan untuk tinggal di Amerika Serikat dengan membayarkan jumlah tertentu. Dengan jumlah '*gift*' yang tinggi ini, Trump menargetkan individu berkapital tinggi untuk membuka peluang kerja bagi warga negara Amerika Serikat.



Gambar 2.6. Laman website The Trump Gold Card

Source: laman website trumpcard.gov

Pendaftaran program ini dapat diakses melalui website trumpcard.gov yang mengharuskan pendaftar untuk membayar 15.000 dolar AS sebagai processing fee, dan apabila telah mendapatkan persetujuan,

pendaftar dapat memberi kontribusi sebesar 1 juta dolar AS yang akan disalurkan kepada *Department of Commerce*. Setelah itu, pendaftar akan menerima izin tinggal di Amerika Serikat bersama dengan Trump Gold Card. Setiap kartu gold card yang dikeluarkan sudah termasuk dengan pasangan dan anak di bawah usia 21 tahun dari pendaftar.

Selain untuk individu, program ini juga menyediakan opsi untuk korporasi yang mematok biaya sebesar USD 2 juta dengan harapan imigran yang masuk ke Amerika Serikat dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk warga Amerika Serikat. Untuk kedepannya, terdapat wacana untuk memberlakukan Trump Platinum Card yang mematok biaya sebesar USD 5 juta dengan keuntungan pajak, yaitu pemilik dapat tinggal di Amerika Serikat selama 270 hari per tahun tanpa dibebani tanggungan pembayaran pajak.

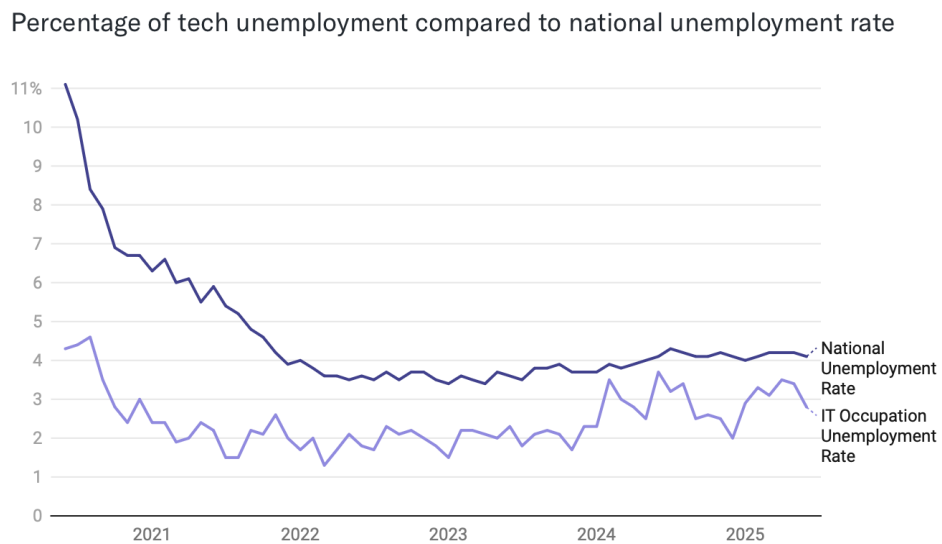
Adapun kelebihan yang dimiliki oleh program Trump Gold Card adalah seperti cepatnya proses aplikasi yang dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan, kemudian pemilik gold card juga dapat mendaftar sebagai warga negara Amerika Serikat setelah memenuhi minimal tinggal selama 5 tahun. The Trump Gold Card dapat disetarakan dengan lawful permanent resident visa tipe EB-1 dan EB-2 yang dikategorikan sebagai individu dengan kemampuan spesial dan pengalaman kerja yang memenuhi standar.

2.4.2. H-1B Non-immigrant Visa

Selain kebijakan baru, Trump 2.0 juga menerapkan perubahan pada kebijakan yang telah ada seperti visa non imigran H-1B. Seiring dengan turunnya presidential proclamation pada september 2025, *Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers* diberlakukan. Perubahan ini membawa pembatasan pengeluaran visa H-1B dan penambahan pembayaran sejumlah USD 100,000 untuk setiap permohonan visa dari perusahaan. Pembatasan ini diberlakukan sejak diresmikannya presidential proclamation pada 21 september 2025.

Dalam proklamasinya, Trump menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program H-1B terjadi eksploitasi yang mana pekerja imigran menggantikan pekerja Amerika dengan upah dan keterampilan yang lebih rendah. Hal ini dianggap sebagai ancaman dan merusak ekonomi Amerika Serikat. Data yang digunakan dalam justifikasi kebijakan menunjukkan bahwa jumlah pekerja asing di sektor STEM meningkat jauh lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja STEM secara keseluruhan. Antara tahun 2000 hingga 2019, jumlah pekerja STEM asing meningkat lebih dari dua kali lipat, sementara total pekerjaan STEM hanya tumbuh sekitar 44,5 persen. Dalam sektor komputer dan matematika, proporsi tenaga kerja asing naik dari 17,7 persen menjadi 26,1 persen. Pemerintah Trump memandang tren ini sebagai indikasi bahwa visa H-1B tidak lagi berfungsi sebagai

mekanisme pengisian kekurangan tenaga kerja, melainkan sebagai instrumen penekan upah.



Gambar 2.7. Grafik persentase perbandingan antara angka pengangguran nasional dan pengangguran di bidang TI

Source: (Wilkinson, The Yahoo Finance)

Selain itu, hal yang sama terjadi pada spesifik industri TI. Dimana pada 2025, dari keseluruhan angka 4,2 persen unemployment di Amerika Serikat sebanyak 2,8 persen diisi oleh bidang TI. Perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Apple, Cognizant, Google, Meta and Microsoft, Deloitte, JPMorgan Chase, Tata Consultancy Services dan Walmart lebih mengalami penurunan lowongan pekerjaan setiap bulannya. Akan tetapi, hal ini juga disertai dengan meningkatnya permohonan program visa H-1B dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Fokus dari kritik Trump diarahkan terutama pada perusahaan teknologi informasi dan perusahaan outsourcing TI, yang mendominasi penggunaan H-1B. Proporsi pekerja TI dalam program H-1B meningkat dari 32 persen pada FY 2003 menjadi lebih dari 65 persen dalam lima tahun fiskal terakhir. Studi-studi yang dirujuk dalam kebijakan menunjukkan bahwa pekerja H-1B, khususnya pada level pemula, menerima upah hingga 36 persen lebih rendah dibanding pekerja Amerika. Praktik ini dinilai menciptakan pasar tenaga kerja yang merugikan warga negara Amerika, sekaligus memperburuk prospek lulusan baru di bidang teknologi dan teknik.

Selain dampak ekonomi, Trump juga membingkai penyalahgunaan H-1B sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Pemerintah menyoroti keterlibatan sejumlah perusahaan outsourcing berbasis H-1B dalam kasus penipuan visa, pencucian uang, dan pelanggaran hukum lainnya. Lebih jauh, ketergantungan pada tenaga kerja asing berupah rendah dianggap mengurangi insentif warga Amerika untuk menekuni karir di bidang sains dan teknologi, yang dalam jangka panjang dinilai berisiko melemahkan kepemimpinan teknologi Amerika Serikat.

Hal ini ditindaklanjuti oleh USCIS dengan membatasi pembuatan visa H-1B sebanyak 65.000 setiap tahunnya, dengan tambahan kuota 20.000 untuk memiliki gelar tinggi di Amerika Serikat. Dengan adanya aturan ini,

pengadaan visa H-1B akan terkonsentrasikan pada penerimaan tenaga kerja berupah dan berketerampilan tinggi. Perubahan yang sejalan dengan gagasan Trump dalam proklamasinya kemudian mulai diterapkan pada februari 2026 dan akan berlaku pada musim pendaftaran H-1B FY 2027.